



**MEGAWATI SOEKARNOPUTRI DAN POLITIK NASIONAL
INDONESIA 1987-2004**
Sebuah Biografi Politik

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata-1 dalam Ilmu Sejarah

Disusun oleh:

Rendrawati

NIM 13030110120018

FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

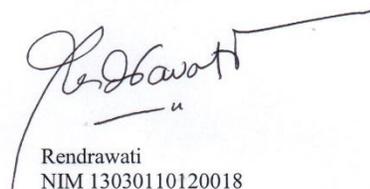
2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya, Rendrawati, menyatakan bahwa karya ilmiah skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan karya ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanahan baik Strata Satu (S1), Strata Dua (S2), maupun Strata Tiga (S3) pada Universitas Diponegoro maupun perguruan tinggi lain.

Semua informasi yang dimuat dalam karya ilmiah ini yang berasal dari penulis baik yang dipublikasikan maupun tidak telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari karya ilmiah skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya pribadi sebagai penulis.

Semarang, 14 Juni 2017
Penulis



Rendrawati
NIM 13030110120018

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Berbahagialah dia yang makan dari keringatnya sendiri bersuka karena usahanya sendiri dan maju karena pengalamannya sendiri.”

-Pramoedya Ananta Toer-

“You may learn something, and whether what you see be fair or evil, that may be profitable, and yet it may not. Seeing is both good and perilous”

-Galadriel-

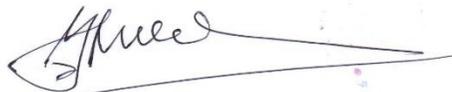
“Straight Roads Doesn't Make Skillful Drivers”

-Paulo Coelho-

Dipersembahkan untuk:

Renny, kedua orang tuaku, kedua adikku,
seluruh perempuan di Indonesia,
seluruh teman-temanku
di Departemen Sejarah Universitas Diponegoro.

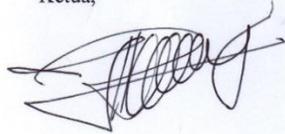
Disetujui,
Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Y. Rochwulaningsih', written over a horizontal line.

Prof. Dr. Yetty Rochwulaningsih, M.Si.
NIP 196106051986032001

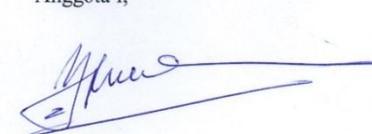
Skripsi dengan judul “Megawati Soekarnoputri dan Politik Nasional Indonesia 1987-2004: Sebuah Biografi Politik” yang disusun oleh Rendrawati (13030110120018) telah diterima dan disahkan oleh panitia ujian skripsi program Strata-I Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro pada hari Rabu, 14 Juni 2017.

Ketua,



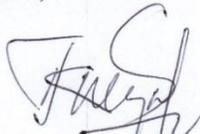
Dr. Haryono Rinardi, M.Hum.
NIP 196703111993031004

Anggota I,



Prof. Dr. Yety Rochwulaningsih, M.Si.
NIP 196106051986032001

Anggota II,



Dra. Titiek Suliyati, M.T.
NIP 195612191987032001

Anggota III,



Rabith Jihan Amaruli, S.S., M.Hum.
NIP 198307192009121004

Mengesahkan,
Dekan,



Dr. Redyanto Noor, M.Hum
NIP 195903071986031002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, rezeki, dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Megawati Soekarnoputri dan Politik Nasional Indonesia 1987-2004: Sebuah Biografi Politik”. Penulis memilih topik ini karena ketertarikan penulis dengan dunia politik dan perempuan, sekaligus didasari dengan keprihatinan sedikitnya penulisan sejarah perempuan. Skripsi ini disusun untuk menempuh ujian strata 1 pada Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro Semarang.

Skripsi ini disusun berdasarkan hasil studi dan penelitian dalam bidang ilmu sejarah. Dalam perjalanan menulis skripsi ini, penulis menemukan berbagai kendala, tetapi berkat dukungan, saran, kritik, dan bantuan dari berbagai pihak skripsi ini dapat terselesaikan. Melalui kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada kedua orang tua penulis, dan kedua adik penulis yang tidak pernah berhenti memberikan semangat dan doa serta mendengarkan keluh kesah penulis.

Terima kasih kepada Dr. Redyanto Noor, M. Hum., selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro dan Dr. Dhanang Respatih Puguh, M.Hum., selaku Ketua Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro, yang memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Kepada Dr. Endang Susilowati, M.A., selaku Ketua Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro periode sebelumnya yang pada tahun 2014 memberikan ijin penelitian kepada penulis.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Prof. Dr. Yety Rochwulaningsih, M. Si., selaku dosen wali dan dosen pembimbing yang telah sabar dalam memberikan arahan dan bimbingan selama proses penulisan skripsi hingga akhirnya tersusun menjadi sebuah karya ilmiah. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Dr. Haryono Rinardi, M. Hum., Dra. Titiek Suliyati, M.T., dan Rabith Jihan Amaruli, S.S., M. Hum., selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun bagi skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya yang memberikan berbagi ilmu dan kenangan selama proses perkuliahan. Seluruh staf TU, perpustakaan jurusan sejarah, dan perpustakaan UNDIP yang telah membantu kelancaran akademik serta kelancaran studi pustaka penulis.

Terima kasih kepada Soleh, selaku staf Kesekretariatan Negara (Setneg) yang memberikan kemudahan kepada penulis dalam mencari data. Terima kasih kepada narasumber yang bersedia memberikan kisah dan pandangan kepada penulis. Psikolog Ervina, M. Psi., yang membantu dan memberikan dukungan secara psikis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sangat bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada Risda, Fadhil, Army, Tita, Tian, Zatio, Marcut serta kepada kawan-kawan angkatan 2010 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dan adik-adik dari angkatan 2011 dan 2012 yang selalu memberikan semangat, juga kepada Ulin, Nance, saudari sekosan Wisma Tara dan seluruh anggota komunitas Asos Fashion Finder di Inggris yang bersedia menampung keluh kesah dan memberi semangat penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Tidak ada hal lain yang penulis harapkan selain kritik dan saran dari pembaca untuk perbaikan penulisan skripsi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kepentingan ilmu pengetahuan.

Semarang, 14 Juni 2017

Rendrawati

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN MOTO DAN PERSEBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR SINGKATAN	x
DAFTAR ISTILAH	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
RINGKASAN	xv
SUMMARY	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang dan Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Tinjauan Pustaka	12
E. Kerangka Pemikiran	15
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Penulisan	21
BAB II INDONESIA PADA MASA ORBA	23
A. Konsolidasi Politik Orba	23
B. Penyederhanaan Parpol	34
C. Pengendalian Aktifitas Politik Masyarakat	40
BAB III MEGAWATI SOEKARNOPUTRI DALAM TEKANAN ORBA	49
A. Konflik Internal PDI	49
B. Pengebirian Politik Megawati	54
C. Legalitas Politik Megawati	66

BAB IV	MEGAWATI DALAM PANGGUNG KEKUASAAN POLITIK NASIONAL	75
	A. Megawati Dalam Pusaran Reformasi	78
	B. Megawati Saat Menjabat Menjadi Wakil Presiden	87
	C. Megawati Soekarnoputri Sebagai Presiden RI	90
BAB V	SIMPULAN	102
	DAFTAR PUSTAKA	104
	DAFTAR INFORMAN	115

DAFTAR SINGKATAN

ABRI	: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
G30S	: Gerakan 30 September
Gerwani	: Gerakan Wanita Indonesia
GMNI	: Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia
Golkar	: Golongan Karya
Golput	: Golongan Putih
Hankam	: Pertahanan dan Keamanan
IMF	: <i>International Monetary Fund</i>
IPKI	: Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia
Kassospol	: Kepala Staf Sosial Politik
Ketum	: Ketua Umum
KKN	: Korupsi Kolusi Nepotisme
Kopkamtib	: Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
Kudatuli	: Kudeta Dua Tujuh Juli
MALARI	: Malapetaka Lima Belas Januari
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
NU	: Nahdahtul Ulama
Parkindo	: Partai Kristen Indonesia
Partai Murba	: Partai Musyawarah Rakyat Banyak
Partai Perti	: Persatuan Tarbiyah Islamiyah
Partindo	: Partai Indonesia
PDI	: Partai Demokrasi Indonesia

PDIP	: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Pemilu	: Pemilihan Umum
Petrus	: Penembak Misterius
Pilpres	: Pemilihan Presiden
PKI	: Partai Komunis Indonesia
PKK	: Pembina Kesejahteraan dan Keluarga
PNI	: Partai Nasional Indonesia
PPP	: Partai Persatuan Pembangunan
PRD	: Partai Rakyat Demokratik
PSSI	: Partai Syarikat Islam Indonesia
SARA	: Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan
Supersemar	: Surat Perintah Sebelas Maret
Tim-Tim	: Timor Timur
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar

DAFTAR ISTILAH*

<i>Caretaker</i>	:	Pengurus partai yang bertugas untuk menjaga ketertiban selama kongres.
<i>De Facto</i>	:	Pada fakta (kenyataan).
<i>De Jure</i>	:	Berdasarkan (atau menurut) hukum.
Depolitisasi	:	Penghapusan kegiatan berpolitik.
Desoekarnoisasi	:	Usaha atau tindakan yang dilakukan pemerintah Orba untuk menghapus pengaruh Soekarno dari ingatan masyarakat yang dilakukan oleh Orba.
Diktator	:	Seorang pemimpin negara yang memerintah secara otoriter/tirani dan menindas rakyatnya.
Dwifungsi ABRI	:	Suatu doktrin di lingkungan Militer Indonesia yang menyebutkan bahwa TNI memiliki dua tugas, yaitu pertama menjaga keamanan dan ketertiban, kedua memegang kekuasaan dan mengatur negara.
Emansipasi	:	Persamaan hak dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat
<i>Floating Mass</i>	:	Kebijakan politik Orba yang membatasi parpol membentuk kepengurusan hanya sampai kabupaten dan tidak membangun dukungan masyarakat dengan partai politik.
Fusi	:	Gabungan atau peleburan. Di dalam skripsi ini, pemerintah Orba meleburkan partai-partai yang mengikuti Pemilu 1971 dan dileburkan menjadi 2 partai Bersama Golkar.

*Kata dalam istilah ini diambil dari KBBI dan Ensiklopedia

- Golput : Sebutan kepada gerakan protes mahasiswa yang terjadi pada Pemilu 1971, yang menolak untuk mencoblos Golkar atau partai tertentu.
- Konsensus : Sebuah kesepakatan yang disetujui bersama-sama. Dalam skripsi ini, putera-puteri Soekarno mengeluarkan konsensus untuk menghindari politik.
- Mega-Bintang : Koalisi lintas ideologis antara PDI Megawati dengan PPP yang terjadi pada Pemilu 1997.
- Petrus : Penembak misterius, istilah yang digunakan oleh masyarakat setelah maraknya penemuan mayat yang tertembak secara misterius tahun 1982-1983.
- Proxy War* : Perang proksi, perang ketika lawan kekuatan menggunakan pihak ketiga sebagai pengganti konflik langsung satu sama lain secara langsung.
- Reformasi : Pembaharuan terhadap sistem yang ada.
- Reshuffle* : Perombakan kabinet atau keanggotaan.
- Safari : Kunjungan politik untuk menggalang dukungan. Istilah ini sering dipakai di masa Orba.

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar:		
3.1	Konferensi Pers di Halaman	62
3.2	Megawati Menjenguk Korban Kudatuli	70
4.1	Ucapan Selamat kepada Presiden dan Wakil Presiden Baru	87
4.2	Pelantikan Presiden Megawati	91

RINGKASAN

Skripsi ini berjudul “Megawati Soekarnoputri dan Politik Nasional Indonesia 1987-2004: Sebuah Biografi Politik”. Penelitian skripsi ini menggunakan metode sejarah kritis yang terbagi ke dalam empat tahap yaitu, heuristik (pengumpulan sumber); kritik sumber (pengujian sumber); interpretasi (menyusun antara fakta satu dengan yang lainnya); dan historiografi (penulisan kembali peristiwa sejarah). Pokok pembahasan dalam skripsi ini mengenai tokoh politik nasional, Megawati Soekarnoputri, dalam mengarungi dunia politik Indonesia semasa Orde Baru, masa Reformasi hingga berhasil mencapai dua jabatan tertinggi yang dicapai oleh perempuan Indonesia kontemporer yaitu sebagai Wakil Presiden dan Presiden Republik Indonesia. Penulis menggunakan pendekatan Ilmu Politik guna memberikan gambaran yang mendalam mengenai kondisi politik Indonesia.

Kondisi politik yang berubah pasca peristiwa G30S dan bergantinya era Pemerintahan Soekarno ke era Orba, mengakibatkan keluarga Presiden Soekarno memilih untuk menjauh dari dunia politik, puncaknya adalah ketika keluarga besar Soekarno mengeluarkan konsensus yang menyatakan bahwa keluarga Soekarno tidak berpolitik. Kemunculan Megawati dalam kancah politik Orba melalui PDI, menunjukkan bahwa keluarga Soekarno sudah kembali berani tampil kembali. Perjuangan Megawati dimulai setelah namanya masuk dan terpilih dalam KLB PDI tahun 1993. Laju politik Megawati tidak berhenti, karena banyaknya konflik yang dihadapi oleh Megawati selama menjabat sebagai Ketua Umum PDI, apalagi Pemerintah Orba tidak mendukung PDI Megawati. Pada tahun 1996, PDI Soerjadi melakukan perlawanan kepada PDI Megawati yang mengakibatkan terjadinya Peristiwa Kudatuli. Pemerintah Orba tidak mengakui PDI Megawati dan melarang Megawati untuk tampil di kancah politik.

Setelah era Orba jatuh pada tahun 1998, Megawati tetap tampil sebagai politikus yang memiliki banyak simpatisan. Megawati melakukan pembaharuan kepada partainya dan berganti nama menjadi PDI Perjuangan pada tahun 1999. Pada tahun yang sama, Megawati dijagokan menjadi Presiden, namun kalah suara dengan Gus Dur sehingga Megawati menjadi Wakil Presiden. Diwarnai lika-liku politik yang cukup panas, Megawati berhasil menjadi Presiden RI ke-5. Selama menjabat menjadi Presiden, Megawati kerap menghadapi kritikan yang keras dari pendukung maupun musuh politiknya, namun Megawati berhasil membuat KPK dan melakukan Pilpres yang berjalan secara adil dan demokratis untuk pertama kalinya.

SUMMARY

This study entitled “Megawati Soekarnoputri and Indonesian National Politic 1987-2004: A Political Biography”. This study using critical historical method which is divide into four stages: heuristic (source collection); source critics (source testing); interpretation (composing facts with one another); and historiography (rewrites of historical events). The subject of this thesis discussed the national political figure, Megawati Soekarnoputri, in wading trough of Indonesian politics, during New Order era, The Reformation, to successfully two highest positions reached by contemporary Indonesian women as Vice President and President of The Republic of Indonesia. The author used approach of political science in order provide a description of the depth of the political condition of Indonesia.

The political conditions that changed after the G30S event and the turn of the era of President Soekarno to the era of New Order, resulted in family of President Soekarno chose to move away from the world of politics. The result was when the big family of President Soekarno issued a consensus stated that the family of President Soekarno was not be in politics. Megawati’s appearance in the political scene of the New Order era through PDI in 1987, showed that the family of President Soekarno has returned to the political world. Megawati’s political struggle began after her name entered and was elected to the extraordinary congress of PDI in 1993. Megawati’s political pace didn’t stop because of multitude of conflicts in PDI and New Order government did not support her chairmanship. In 1996, Soerjadi, with his PDI supporters, rebelled against Megawati and her PDI supporters which resulted The Kudatuli incident. The New Order government did not recognize PDI Megawati and prohibited her to appear in any political scene.

After the New Order era fell in 1998, Megawati still appeared as politician with many sympathizers. Megawati reformed the party and changed its name to PDI Perjuangan in 1999. In the same year, she was nominated to be president, but lost votes to Abdurrahman Wahid or also known as Gus Dur and Megawati became Vice President. With lots of political twist, Megawati succeeded to become The Fifth President of The Republic of Indonesia. During her term as president, Megawati often faces harsh criticism from her supporters and political enemies, but Megawati successfully created KPK and do The Presidential Election which run democratically for the first time.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Permasalahan

Dinamika politik Indonesia kontemporer sangat dinamis dan mengalami banyak guncangan, antara lain setelah terjadinya peristiwa Gerakan 30 September (G30S) 1965 yang dipicu oleh penculikan dan pembunuhan 6 orang Jenderal dan seorang perwira muda TNI Angkatan Darat (TNI AD). Ricklefs menyebutkan bahwa sejarah kontemporer Indonesia setelah peristiwa tersebut diwarnai oleh peristiwa-peristiwa yang menyedihkan terutama bagi Presiden Soekarno.¹ Adapun Adam Malik menuliskan bagaimana keadaan genting itu dimanfaatkan oleh lawan-lawan politik Presiden Soekarno untuk menggulingkannya dengan tuduhan bahwa Presiden Soekarno terlibat dalam tragedi berdarah tersebut. Setelah cara tersebut dinilai gagal, maka mereka mulai menggerakkan massa untuk menekan Presiden Soekarno.²

Belum cukup dengan masalah di Ibukota, di seluruh pelosok Jawa dan beberapa wilayah di Indonesia banyak terjadi pembunuhan massal. Para anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) atau simpatisannya ditangkap,³ ditahan, ada juga yang dibunuh.⁴ Hal serupa juga dikemukakan oleh Jusuf Wanandi dalam memoarnya mengenai Orba, akibat ketidakjelasan kondisi politik saat itu, banyak pembunuhan yang terjadi tanpa

¹M.C Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008* (Jakarta: Serambi Ilmu, 2008), hlm. 596.

²Adam Malik, *Mengabdikan Republik Jilid II : Angkatan 45* (Jakarta: Penerbit PT Gunung Agung, 2006)

³“Hasil Operasi Menumpas Gestapu di Jateng”, *Koran Tempo*, 7 Desember 1965, dan lihat juga “200 Sisa-Sisa Gestapu/PKI ditangkap di Daerah Pekalongan”, *Koran Tempo*, 3 Juli 1968.

⁴“Mertua Diganjang Menantu Sendiri Karena Djadi “Gestapu””, *Koran Tempo*, 7 Desember 1965.

rasa takut terhadap konsekuensi hukum.⁵ Bahkan anggota keluarga dari orang-orang atau kelompok masyarakat yang dianggap dekat dengan PKI juga ikut ditahan atau mengalami nasib yang sama seperti orang-orang yang dituduh anggota PKI.⁶ Tidak hanya itu, di sebagian wilayah Indonesia pada akhir tahun 1965, adakalanya ditemukan mayat tanpa identitas di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Pada puncaknya, di Jakarta dan di kota-kota besar lainnya terjadi demonstrasi mahasiswa besar-besaran yang didukung oleh TNI AD yang kemudian melahirkan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura) yang berisi: bubarkan PKI; turunkan harga kebutuhan pokok; dan *retool* Kabinet Dwikora dari menteri-menteri yang diduga terlibat G30S.⁷

Orang-orang TNI AD yang dekat dengan Soeharto dan merupakan kepercayaannya, antara lain Ali Moertopo dan Kemal Idris. Di dalam majalah TEMPO edisi khusus yang membahas Ali Moertopo, dituliskan bagaimana Ali Moertopo “bekerja dibelakang layar” dengan cara menyokong dan melindungi gerakan mahasiswa serta kelompok lain yang menginginkan kejatuhan Soekarno.⁸ Dalam hal ini melindungi antara lain dengan cara menyembunyikan para demonstran di kantornya dan memberikan senjata api jenis pistol FN. Sementara itu Kemal Idris mengakui bahwa ia memberikan pengarahan kepada para mahasiswa ITB yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) untuk melakukan demonstrasi yang tidak anarkis sehingga bisa menarik simpati masyarakat banyak, dan strategi ini disetujui

⁵Jusuf Wanandi, *Menyibak Tabir Orba: Memoar Politik Indonesia 1965-1998* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2014), hlm. 94.

⁶Taufik Abdullah, Restu Gunawan, Sukri Abdurrachman, I Ketut Ardhana, *Malam Bencana 1965: Dalam Belitan Krisis Nasional Jilid II* (Jakarta: Penerbit Yayasan Obor, 2012)

⁷Wanandi, *Menyibak Tabir Orba*, hlm. 59.

⁸“Perintis Jalan Politik Soeharto”, *TEMPO*, Edisi 14-20 Oktober 2014, Jakarta, hlm. 43.

oleh Soeharto.⁹ Instruksi Kemal Idris ini dilaksanakan dengan sangat antusias oleh KAMI pada tanggal 10 Januari 1966.¹⁰

Supremasi Soeharto dengan Orba semakin berjaya setelah keluarnya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang terbit pada tanggal 11 Maret 1966. Selanjutnya, rezim Orba melalui Sidang Umum MPRS mengeluarkan TAP MPRS RI No. XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintah Negara dari Presiden Soekarno.¹¹ Hal itu terjadi karena Presiden Soekarno dianggap tidak memenuhi tanggungjawab konstitusional. Melalui TAP MPRS yang sama, Soeharto ditunjuk sebagai Pejabat Presiden dan Presiden Soekarno langsung dijadikan tahanan rumah. Di tangan Soeharto dan pemerintah Orba, Supersemar dipandang sebagai mandat atau perintah politik untuk menjalankan roda pemerintahan negara Republik Indonesia (RI). Supersemar tidak hanya menandai peralihan kekuasaan, tetapi ada implikasi-implikasi politik dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia selanjutnya.¹² Hal pertama yang dilakukan oleh Soeharto adalah membubarkan PKI, merombak kabinet, dan menteri yang dianggap “pro-komunis” dan dekat dengan Presiden Soekarno dicopot.¹³ Tidak hanya itu saja, Supersemar dalam praktiknya juga diarahkan untuk disejajarkan dengan UUD 1945. Hal ini antara lain ditunjukkan dalam buku “Indonesia Sejak Supersemar” yang diterbitkan pada tahun 1973 atas izin Departemen

⁹Rosihan Anwar, et.al., *Kemal Idris: Bertarung Dalam Revolusi* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 60.

¹⁰Anwar, *Kemal Idris*, hlm. 66.

¹¹“Pencabutan Kekuasaan Pemerintah Negara Dari Presiden Soekarno”, TAP MPRS RI No. XXXIII/MPRS/1967, (Sekretariat Negara).

¹²A. Yusrianto Elga, *Misteri Supersemar* (Jogjakarta: Penerbit Palapa, 2013), hlm. 127

¹³“Perintis Jalan Politik Soeharto”, *TEMPO*, hml. 43.

Penerangan, yaitu ditegaskan bahwa Supersemar memiliki arti penting dalam kehidupan bangsa dan kehidupan masyarakat Indonesia.¹⁴

Pada awal masa Orba, banyak dilakukan gerakan desoekarnoisasi dan gerakan pro-Soeharto serta membangun stigma bahwa masa kepemimpinan Presiden Soekarno sebagai Orde Lama yang diwarnai oleh penyelewengan terhadap UUD 1945.¹⁵ Sebutan Orde Lama ini bisa berkonotasi negatif dan menurunkan citra pemerintahan sebelumnya, yang seharusnya dihormati sebagai kesinambungan kepemimpinan suatu bangsa dan suatu pemerintahan dalam suatu negara demokratis. Berbeda dengan era Presiden Soekarno, pemerintahan di era Soeharto dengan Orba yang lebih dekat dengan Blok Barat. Kerjasama dengan Barat dibuka selebar-lebarnya, dan melakukan banyak kerjasama dengan investor asing berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing atau yang lebih dikenal dengan sebutan UU PMA yang dibuat setelah Soeharto berkuasa. Di saat yang bersamaan, secara sistematis rezim itu membungkam masyarakat Indonesia dengan gerakan-gerakan represif yang mematikan. Jika ada rakyat yang menuntut hak mereka atau berpikiran kritis, maka ancaman yang didapat bisa sangat membahayakan atau dituduh sebagai anggota PKI, ekstrim kiri dan ekstrim kanan seperti yang terjadi dalam peristiwa MALARI pada tahun 1974.¹⁶ Hal yang sama juga terjadi saat Tragedi Tanjung Priok pada tahun 1984.

17

¹⁴Laidin Girsang, *Indonesia Sejak Supersemar* (Jakarta: Penerbit Yayasan Laita, 1973), hlm. vi.

¹⁵Girsang, *Indonesia Sejak Supersemar*, hlm. 28.

¹⁶“Kopkamtib Adakan Penangkapan-Penangkapan”, *Berita Yudha*, 17 Januari 1974.

¹⁷“Tragedi Berdarah di Priok”, *Sinar Harapan: Rekaman Peristiwa '84*, hlm. 91. Dan lihat juga, Koto, Indrian., *Tragedi-Tragedi Kemanusiaan Di Indonesia* (Jogjakarta: Penerbit Laksana, 2012).

Selama Orba, militer menjadi sangat berkuasa melalui Dwi Fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Dwifungsi ABRI merupakan konsep keterlibatan militer dalam urusan-urusan nonmiliter, serta dominasi mereka atas perangkat negara.¹⁸ Anggota ABRI memiliki hak konstitusional bidang Pertahanan Keamanan (Hankam) dan Non Hankam. Implikasinya seorang anggota ABRI bisa memiliki dua bidang tugas sekaligus, di bidang militer dan bidang sipil, seperti di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Terlebih di bidang politik, meskipun Presiden Soeharto tidak memberikan hak memilih kepada ABRI, tetapi, ABRI memiliki “hak istimewa” untuk mengirimkan utusan mereka dalam lembaga DPR tanpa dipilih dan militer memiliki fraksi sendiri dengan kekuatan 75 kursi atau 15% kursi DPR.¹⁹ A. Hasnan Habib menulis, bahwa kekuasaan politik yang tidak terbatas itu ternyata meracuni mental para tokoh Orba, termasuk ABRI, karena muncul sifat arogan dan angkuh. Mereka merasa bahwa hanya pandangan dan pendapat mereka yang benar, yang mesti harus diikuti kalau bangsa ini ingin menjadi besar.²⁰

Agenda Pemilihan Umum (Pemilu) pertama Orba baru direncanakan pada tahun 1971, padahal menurut ketetapan MPRS Nomor XI Tahun 1966 tentang Pemilihan Umum, seharusnya Pemilu dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 6 Juli 1968.²¹ Penundaan ini dikarenakan Jenderal Soeharto belum memiliki kendaraan politik yang pas. Golongan Karya, yang awalnya berbentuk organisasi kemasyarakatan

¹⁸Julia Suryakusuma, *Ibuisme Negara: Konstruksi Sosial Keperempuanan Orba* (Depok: Komunitas Bambu, 2011), hlm. 7.

¹⁹“Jejak Sepatu Lars Dalam Lintasan Politik”, *Sindo Weekly*, 11 Juni 2014, hlm. 29.

²⁰A.Hasnan Habib, “Posisi dan Peranan Militer”, *Masyarakat Warga dan Pergulatan Demokrasi*, 2001, Jakarta, hlm. 81

²¹“Pemilihan Umum”, TAP MPRS RI No. XI/MPRS/1966, Sekretariat Negara.

berbasis profesi, dirancang sebagai biduk Sang Jenderal.²² Pada Pemilu tahun 1971, terdapat 10 partai yang mengikuti Pemilu, yaitu: Partai Katolik Indonesia, Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Nahdatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Golongan Karya (GOLKAR), Partai Kristen Indonesia, Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba), Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Partai Perti), dan Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI).²³ Pada tahun 1973, Soeharto mengerdilkan partai-partai dengan mengelompokkan atas dasar ideologis, yaitu nasionalisme dan agama. Soeharto juga berhak menentukan siapa yang pantas untuk memimpin partai, dan jika ada orang yang dicurigai akan menggulingkannya dari kursi kekuasaannya, dia akan meringkus orang tersebut berikut kelompoknya, bahkan jika orang itu memiliki hubungan yang dekat dengannya sekalipun.²⁴ Pemerintah Orba juga melakukan pengontrolan yang ketat terhadap dunia perfilman dan pers melalui Departemen Penerangan sebagai alat kepanjangan tangannya.²⁵

Selama Orba berkuasa di Indonesia, Megawati Soekarnoputri sebagai putri Presiden dan Prokamator yang digantikan oleh Soeharto, ikut merasakan dampaknya. Megawati harus mengalami banyak tekanan, dan salah satunya adalah dikeluarkan dari bangku kuliah di Fakultas Pertanian Universitas Padjajaran, Bandung.²⁶ Hal itu

²²Tim Divaro, Yugha E, *Profil Partai Peserta Pemilu 2014* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014), hlm. xi

²³“Pemilihan Umum Tahun 1971” (http://kepuustakaan-presiden.pnri.go.id/election/directory/election/?box=detail&id=20&from_box=list&hl=1&search_ruas=&search_keyword=&activation_status=, dilihat pada 10 April 2017)

²⁴“De-Benny-Nisasi Segala Lini”, *Tempo*, 12 Oktober 2014, hlm. 112.

²⁵“Juru Terang, Teror, Lalu Terbuang”, *Rahasia-Rahasia Ali Moertopo*, (Jakarta: Penerbit Buku Tempo, 2014), hlm. 64.

²⁶Hamka Haq, *Mengabdikan Bangsa Bersama Presiden Megawati* (Jakarta: Bamusi Press, 2012), hlm. 4.

kemungkinan karena saat menjadi mahasiswa, Megawati Soekarnoputri tercatat sebagai anggota Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) yang berafiliasi dengan Partai Nasional Indonesia (PNI) dan juga manifestasi politik desoekarnoisasi oleh rezim Soeharto.

Sebagai putri Presiden RI pertama, Megawati Soekarnoputri sebenarnya sudah dikenalkan hidup bernegara dan panggung politik sejak usia yang masih belia. Megawati sering sekali diajak menemani ayahnya menyambut tamu negara dan pergi keluar negeri untuk menemani sang ayah yang melakukan kunjungan kenegaraan. Karena tingginya tekanan yang didapat dari pemerintah Orba membuat Megawati serta anggota keluarga Soekarno lainnya pernah membuat konsensus, yang menyatakan untuk tidak memihak salah satu kekuatan politik yang ada. Konsensus ini ditandatangani oleh putera-puteri Soekarno, yaitu: Guntur, Megawati, Rachmawati, Sukmawati, Guruh, Taufan, dan Bayu.²⁷

Pada tahun 1986, Pemerintah Orba mulai memberi kelonggaran bagi PDI. Pemerintah juga memberikan izin PDI untuk mengadakan pawai politik yang besar dengan menggunakan foto dan poster Soekarno,²⁸ dan sekaligus berhasil mengajak bergabung dua anak Soekarno, yaitu Megawati dan Guruh. Megawati mulai menonjol setelah menjadi anggota DPR, dan setelah sebelumnya aktif di PDI cabang Jakarta Pusat selama satu tahun.²⁹ Kemunculan keluarga mantan Presiden Soekarno setelah konsensus pada tahun 1982 adalah setelah adanya kelonggaran yang diberikan pihak penguasa kepada keluarga Soekarno. Pada tahun 1986, kedudukan historis Soekarno mendapat pengakuan dan penghargaan sebagai proklamator dengan pemberian gelar

²⁷Sumarmo, *Megawati Soekarnoputri: Dari Ibu Rumah Tangga sampai Sampai Istana* (Depok: PT Rumpun Dian Nugraha, 2002), hlm. 11.

²⁸Wanandi, *Menyibak Tabir Orba*, hlm. 375.

²⁹Sumarmo, *Megawati Soekarnoputri*, hlm. 3.

Pahlawan Proklamator.³⁰ Koran *Kompas* menulis, bahwa kemunculan Megawati memberikan pengaruh yang besar kepada PDI karena berhasil mendapatkan 40 kursi di DPR, setelah pada Pemilu sebelumnya hanya mendapat 24 kursi.³¹

Pada tahun 1993, pemerintah Orba mengintervensi pemilihan Ketua PDI dengan cara memberlakukan pemilihan dengan sistem formatur yang dianggap lebih baik daripada sistem voting.³² Intervensi ini dilakukan dengan maksud untuk menahan laju Megawati dalam berpolitik, intervensi yang dilakukan oleh pemerintah adalah membentuk panitia Musyawarah Nasional yang mengkaji apakah hasil KLB pada tanggal 7 Desember 1993, memenangkan Megawati.³³ Meskipun Megawati adalah pemain baru dalam dunia perpolitikan Indonesia di akhir 80-an, sikapnya yang pendiam, tidak ambisius, dan tidak licik, justru menarik banyak simpati dari berbagai golongan, terutama dari orang-orang yang masih pro Soekarno. Intervensi yang dilakukan Pemerintah tidak memberikan pengaruh yang berarti, karena pada tahun 1993, Megawati terpilih menjadi ketua PDI.³⁴

Puncaknya adalah ketika pemerintah Orba melakukan intervensi dengan cara melakukan kongres luar biasa PDI di Medan untuk memaksa Megawati turun dari jabatannya dan digantikan oleh Soerjadi. Megawati dan pendukungnya tentu saja menolak hasil kongres ini, dan melancarkan tuntutan hukum karena pemerintah ikut campur tangan dalam urusan pemilihan ketua PDI. Pemerintah Orba melalui ABRI

³⁰Munandar, Haris. Penj., *Wanita-Wanita yang Mengubah Dunia* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009), hlm. 255.

³¹Setiawan, Yohanes., “Menanti Buah Pilihan PDI-P”, *Kompas*, Jakarta, tanggal 17 Januari 2014.

³²“Mega Hampir Pasti Terpilih”, *Kompas*, 5 Desember 1993.

³³“Mendagri: Kemungkinan Mega Jadi Ketua Umum DPP PDI”, *Kompas*, 14 Desember 1993.

³⁴Ricklefs., *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, hlm. 676, dan lihat juga, Riswandha Imawan, *Membedah Politik Orba* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997) hlm. 222.

memutuskan untuk melakukan aksi kekerasan dalam meredam massa PDI.³⁵ Pada tanggal 27 Juli 1996, kantor PDI di jalan Diponegoro, Jakarta diserang oleh segerombolan orang yang mengaku sebagai kelompok pendukung Soerjadi.³⁶

Aksi penyerangan tersebut menewaskan banyak pendukung Megawati, sedangkan yang selamat, ditangkap.³⁷ Meski tujuan utama penyerangan ini adalah untuk menekan musuh politik yaitu Megawati dan masyarakat pendukungnya, ternyata banyak simpati dari berbagai kalangan yang muak dengan perilaku pemerintah Orba yang otoriter dan koruptif dan menjadikan kasus ini sebagai momentum yang tepat untuk meluapkan kekecewaan dan perlawanan mereka melalui demonstrasi besar-besaran yang kemudian berubah menjadi kerusuhan.³⁸ Megawati pun menjadi simbol perlawanan terhadap rezim Orba. Saat Indonesia mengalami gejolak pada tahun 1997-1998, Megawati, bersama Amien Rais, KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dan Sri Sultan Hamengkubuwono X, dan beberapa tokoh lain dikukuhkan sebagai tokoh reformasi.³⁹

Tampilnya Megawati Soekarnoputri dalam kancah perpolitikan Indonesia tidak hanya membuat Indonesia berganti era dan membangkitkan kembali jiwa Soekarno lewat ajaran Trisakti yang mengajarkan agar bangsa Indonesia berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri (berdikari) di bidang ekonomi, serta berkepribadian di bidang kebudayaan kepada masyarakat Indonesia. Kemunculan Megawati juga membuka mata bangsa Indonesia mengenai kemampuan perempuan Indonesia dalam berpolitik dan memimpin negara. Megawati juga membuktikan bahwa seseorang yang

³⁵“Penyelenggara Konfercab PDI akan ditertibkan”, *Suara Merdeka*, 1 Juli 1996, dan lihat juga, “Mega Beraksi, Soerjadi Bergerak”, *Gatra*, 6 Juli 1996.

³⁶“Mega: Saya Siap Mundur”, *Suara Merdeka*, 27 Juli 1996.

³⁷“Pangab: 206 Perusuh Tertangkap”, *Suara Merdeka*, 29 Juli 1996.

³⁸“Tanda Tangan Keprihatinan”, *Gatra*, 20 Juli 1996, hlm. 30.

³⁹“4 Tokoh Nasional: Segera Usut Soeharto”, *Suara Merdeka*, 11 November 1998.

tidak sempat menyelesaikan pendidikan tinggi, bisa menjadi pemimpin sebuah partai dan pemimpin yang disegani, hal ini dibuktikan pada tahun 2004 masuk ke urutan ke 8 dalam daftar 100 wanita terkuat di dunia versi majalah Forbes.⁴⁰ Dengan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan politik Pemerintah Orba untuk menekan aktivitas politik tokoh politik nasional yang dianggap berseberangan atau merupakan ancaman terutama Megawati Soekarnoputri
2. Bagaimana perkembangan dan dinamika politik di Indonesia setelah munculnya Megawati Soekarnoputri sehingga tampil menjadi tokoh politik yang berpengaruh bahkan tampil menjadi Wakil Presiden dan kemudian menjadi Presiden ke-5 Republik Indonesia

B. Ruang Lingkup

Dalam penulisan sejarah diperlukan suatu acuan kerangka berpikir yang sistematis dengan pembatasan ruang lingkup yang jelas. Pembatasan ini diperlukan untuk memudahkan dalam mencari sumber sejarah, menghindari pembahasan yang luas, ditulis secara metodologis serta dapat dipertanggungjawabkan oleh penulis. Penulisan sejarah akan menjadi lebih terarah dengan melakukan batasan-batasan baik secara temporal, spasial, maupun keilmuan, sehingga sejarawan bisa terhindar dari hal-hal yang tidak mempunyai relevansinya dengan penulisan sejarah dan analisis yang bersifat lemah.⁴¹ Dengan demikian, ruang lingkup skripsi ini mencakup ruang lingkup spasial, temporal, dan keilmuan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

⁴⁰Macdonald, Elizabeth, *et al.*, “The World’s 100 Most Powerful Women”, (<http://www.forbes.com/2004/08/18/04powomland.html>, dikunjungi pada 10 Februari 2017)

⁴¹Abdullah, Taufik., “Pendahuluan: Sejarah dan Historiografi”, dalam Taufik Abdullah dan Abdurrahman Suryomiharjo, (ed.), *Ilmu Sejarah dan Historiografi: Arah dan Perspektif* (Jakarta: Gramedia, 1982), hlm. xii

1. Ruang Lingkup Spasial

Ruang lingkup spasial adalah pembatasan yang berdasarkan pada kesatuan wilayah geografis atau wilayah administratif tertentu. Dalam penulisan sejarah politik ini, penulis tidak membatasi wilayah perkembangan politik yang dialami oleh Megawati Soekarnoputri, karena lingkup politik nasional yang luas yaitu Indonesia. Pemilihan beberapa kota besar di Indonesia karena perubahan situasi politik tidak hanya terjadi di Ibu Kota, tetapi juga terjadi di seluruh Indonesia.

2. Ruang Lingkup Temporal

Ruang lingkup temporal adalah batasan pemilihan waktu dalam melakukan penelitian sejarah. Ruang lingkup temporal yang dipakai dalam penelitian sejarah ini adalah tahun 1987 hingga tahun 2004. Tahun 1987 diambil karena pada tahun itu adalah tahun awal kemunculan Megawati di kancah politik Indonesia. Pada tahun 1993 - 1999, Megawati Soekarnoputri sedang menjabat menjadi ketua umum PDI dan mengalami banyak sekali tekanan dari pemerintah Orba.

Membicarakan sosok Megawati Soekarnoputri, dipandang tidak lengkap jika tidak membahas mengenai rezim Orba yang berkuasa selama 32 tahun, maka penulis memasukkan satu bab mengenai pergerakan dan keadaan politik serta sosial Indonesia pada masa Orba.

Penulis juga membahas langkah politik Megawati Soekarnoputri setelah masa Reformasi, memperbarui dan merombak PDI menjadi PDI Perjuangan di tahun 1999 dan menjabat sebagai Wakil Presiden hingga menjabat sebagai Presiden ke-5 Republik Indonesia sekaligus menjadi Presiden perempuan pertama di Indonesia. Tahun 2004 adalah tahun terakhir Megawati Soekarnoputri menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Pada periode ini, penulis membahas mengenai apa saja prestasi dan kekurangan Megawati Soekarnoputri saat menjabat sebagai Presiden.

3. Ruang Lingkup Keilmuan

Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian sejarah ini termasuk ke dalam biografi politik. Karena itu, dibutuhkan ilmu-ilmu sosial lain untuk membantu penelitian ini. Dalam hal ini, penulis memakai ilmu politik dan ilmu sosial sehingga bisa mendapatkan hasil penelitian yang jelas dan objektif. Sejarah politik adalah sejarah yang membahas mengenai perkembangan politik pada suatu zaman dan memiliki pengaruh kepada dan dari kelompok atau tokoh. Penulis membahas mengenai perkembangan politik di Indonesia era Orba karena pada masa ini adalah masa yang paling berpengaruh bagi bangsa Indonesia, terutama bagi Megawati dan keluarga Soekarno serta kelompok atau orang yang dianggap musuh Orba.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan batasan ruang lingkup diatas, penelitian ini dikembangkan dengan beberapa tujuan penelitian untuk memfokuskan analisis sebagai berikut.

Pertama, menganalisa pergerakan dan perkembangan politik Megawati Soekarnoputri di era Orba dan setelah Indonesia memasuki era Reformasi. *Kedua*, mengungkapkan kebaikan dan kejahatan pemerintah Orba dalam mempertahankan kekuasaannya yang berjaya selama 32 tahun. *Ketiga*, menemukan faktor-faktor penyebab mundurnya perempuan dari dunia politik selama era Orba.

Tujuan penulisan sejarah ini adalah untuk menambah penulisan sejarah yang bertemakan perempuan Indonesia, tidak dapat dipungkiri bahwa kemunculan Megawati Soekarnoputri dalam dunia politik membangkitkan semangat perempuan untuk kembali berbicara mengenai politik dan menjadi salah satu tokoh emansipasi perempuan Indonesia modern. Penelitian ini diharapkan sekurang-kurangnya dapat menjadi salah satu referensi dalam penulisan sejarah di masa depan.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka memiliki peran yang sangat penting dalam suatu penelitian karena memiliki fungsi untuk memperdalam masalah yang akan diteliti, menegaskan kerangka

teoritis serta mempertajam konsep-konsep penulisan yang digunakan penulis sehingga mempermudah perumusan masalah. Meskipun studi mengenai perempuan kini lebih mudah ditemui dan sudah diteliti oleh para peneliti dari berbagai disiplin ilmu, tetapi dalam skripsi ini hanya menuliskan beberapa hasil studi yang relevan dengan perempuan dan Megawati Soekarnoputri. Berikut adalah beberapa referensi yang penulis anggap relevan dengan penelitian ini.

Pertama adalah buku karya Drs. Sumarno yang berjudul, *Megawati Soekarnoputri: Dari Ibu Rumah Tangga Sampai Istana Negara*.⁴² Buku ini berisi mengenai perjalanan hidup Megawati Soekarnoputri dari statusnya sebagai Ibu Rumah Tangga biasa hingga menjadi presiden ke-5 RI. Pasca kejatuhan pemerintahan Presiden Soekarno, keluarga dan pendukung Presiden Soekarno mengalami intimidasi dari masyarakat dan pemerintah Orba, sehingga banyak pendukung Soekarno yang menyembunyikan statusnya sebagai pendukung Soekarno, termasuk keluarga Soekarno yang menjauhkan diri dari politik. Secara luas buku ini memberikan gambaran dan pengetahuan mengenai hidup Megawati Soekarnoputri sebelum dan berada di dunia politik dan menjadi seorang presiden seperti sang Ayah, Ir. Soekarno.

Relevansi dalam penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai kehidupan Megawati sebelum menjadi seorang pemimpin negara dan pemimpin partai, dan membahas mengenai kritikan yang didapat oleh Megawati Soekarnoputri, pandangan politik, serta bagaimana sikap Megawati dalam menghadapi lawan politiknya yang dibutuhkan penulis dalam menulis penelitian ini. Secara ruang lingkup spasial, buku ini sesuai dengan lokasi penulisan sejarah ini, tetapi buku ini dinilai tidak sama dengan ruang lingkup temporal yang dipakai oleh penulis karena buku ini terbit pada tahun 2002 dan tidak mengalami pembaruan setelah masa jabatan Presiden Megawati berakhir pada tahun 2004. Perbandingan antara penelitian sejarah ini dengan buku ini adalah buku ini tidak banyak menuliskan perjalanan politik

⁴²Soemarno., *Megawati Soekarnoputri: Dari Ibu Rumah Tangga Sampai Istana Negara* (Depok: PT Rumpun Dian Nugraha, 2002).

Megawati setelah menduduki jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia ke-5, sedangkan penelitian pada penulisan sejarah ini dilakukan hingga sampai berakhirnya masa pemerintahan Megawati sebagai Presiden.

Referensi ke-dua yang dipakai oleh penulis adalah buku yang ditulis oleh Yvonne de Fretes dan kawan-kawan, *Megawati: Anak Putra Sang Fajar*.⁴³ Buku ini membahas mengenai Megawati Soekarnoputri dan perjuangannya sebagai perempuan dan seorang negarawan terutama saat Megawati menjabat sebagai ketua PDI, Ketua Umum PDI Perjuangan, Wakil Presiden sampai Presiden berdasarkan sudut pandang orang-orang sekitar Megawati Soekarnoputri. Sejak kemunculan di dunia politik, Megawati memang dikenal sebagai sosok yang penuh kontroversi tetapi juga sebagai sosok tangguh perempuan yang berani terjun ke dunia politik saat rezim Orba demikian kuatnya. Penulis memakai buku ini sebagai salah satu referensi karena sudut pandang orang-orang terdekat sampai yang berbeda pendapat atau beda politik dengannya yang dibutuhkan penulis dalam memahami karakter kepemimpinan dan berpolitik Megawati.

Buku ini dipakai karena relevansi antara buku ini dan penelitian sejarah ini: berdasarkan ruang lingkup spasial, buku ini mengambil lokasi penulisan di Jakarta, karena mayoritas tokoh yang diwawancarai, Termasuk Megawati, berdomisili di Jakarta. Berdasarkan ruang lingkup temporal, buku ini menuliskan masa pemerintahan Presiden Megawati dari tahun 2001-2004, Perbandingan dengan penelitian ini adalah penulisan waktu yang masih belum runtut sesuai dengan kaidah penulisan sejarah. Selain itu, buku ini tidak terlalu bernuansa politik, berbeda dengan penulisan sejarah ini yang merupakan sejarah politik.

⁴³De Fretes, Yvonne, dkk., *Megawati: Anak Putra Sang Fajar* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2012).

Referensi ke-tiga adalah buku yang ditulis oleh tim penyusun dari Aliansi Jurnalis Independen yang dikoordinatori oleh Santoso, *Peristiwa 27 Juli*.⁴⁴ Buku ini menuliskan mengenai peristiwa 27 Juli 1996 yang merupakan satu peristiwa besar yang memiliki hubungan dengan Megawati sekaligus menjadi awal pergerakan massa yang kemudian melahirkan reformasi. Relevansi dengan penelitian ini adalah tim penulis menghimpun tulisan-tulisan, hasil wawancara, dan pendapat para ahli mengenai peristiwa 27 Juli 1996. Tim penulis mengupas pandangan peristiwa tersebut dari dua sisi yang berbeda, termasuk mencari tahu desas-desus mengenai keterlibatan militer dalam tragedi tersebut. Penulis mendapatkan gambaran mengenai kondisi politik dan sosial sebelum kejatuhan Orba, terutama mengenai permasalahan internal PDI dan campur tangan rezim Orba di dalamnya.

Relevansi buku ini dengan penelitian sejarah ini adalah ruang lingkup spasial dalam penelitian ini, karena penulis mendapatkan gambaran keadaan dunia politik dan masyarakat Indonesia sesaat dan sebelum peristiwa 27 Juli 1996 terjadi yang membedakan buku ini dengan penelitian ini adalah pemilihan waktu yang dipilih oleh penulis yaitu hingga tahun 2004. Berdasarkan ruang lingkup spasial yang dipakai oleh penulis, buku ini relevan dengan lokasi penelitian yang diambil penulis yaitu Jakarta. Perbandingan antara penelitian sejarah ini dengan buku ini adalah buku ini hanya terfokus pada peristiwa 27 Juli 1996, sedangkan penelitian sejarah ini mengambil waktu hingga 2004.

Sumber terakhir yang dipakai dalam penelitian ini adalah artikel-artikel dari koran atau majalah dan jurnal penelitian ilmiah yang relevan dengan penelitian ini. Beberapa sumber dari koran yang digunakan oleh penulis adalah artikel dari Koran Kompas yang berjudul “Menanti Buah Pilihan PDI-P”,⁴⁵ dan artikel dari Majalah

⁴⁴Santoso, dkk., *Peristiwa 27 Juli* (Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen Institut Studi Arus Informasi, 1997).

⁴⁵Yohanes Krisnawan, “Menanti Buah Pilihan PDI-P”, *Kompas*, 17 Januari 2014, hlm. 5.

TEMPO edisi khusus mengenai Ali Moertopo, dengan judul artikel “ Perintis Jalan Politik Soeharto”.⁴⁶

Relevansi kedua artikel tersebut dalam penelitian ini adalah: pertama, dalam artikel koran Kompas membahas mengenai sejarah PDI dan Megawati serta pengaruh Megawati dalam partai berlambang kepala banteng tersebut. Kedua, di dalam artikel “Perintis Jalan Politik Soeharto”, dibahas mengenai cara-cara yang dilakukan Ali Moertopo dalam usaha memuluskan ambisi Soeharto untuk berkuasa di Indonesia. Kedua artikel tersebut memberikan banyak informasi yang diperlukan penulis dalam menyusun skripsi ini.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, dibutuhkan pendekatan ilmu-ilmu sosial sehingga menjadikan hasil penelitian ini berguna di masa depan nanti. Dengan adanya bantuan dari ilmu-ilmu sosial lain, akan membantu penelitian sejarah ini menjadi lebih rinci dan obyektif. Dalam penelitian ini, penulis juga akan menggunakan pendekatan ilmu politik. Dalam ilmu politik, sejarah merupakan alat yang paling penting untuk mendapatkan data dan fakta yang bisa dikaji lebih lanjut.⁴⁷ Secara harfiah, Ilmu Politik berasal dari kata “ilmu” yang bermakna pengetahuan yang tersusun secara sistematis, berdasarkan fakta, serta dapat dibuktikan kebenarannya dan bersifat universal, sedangkan kata politik berasal dari kata “Polis” dan “Taia” yang bermakna negara dan urusan. Kesimpulannya adalah jika membicarakan politik maka manusia membicarakan urusan negara.⁴⁸

⁴⁶“Perintis Jalan Politik Soeharto”, *Tempo*, edisi 14-20 Oktober 2013, hlm. 43-44.

⁴⁷Budiarjo, Miriam., *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 17.

⁴⁸Rahman, A., *Sistem Politik Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 5-6.

Secara umum, Ilmu Politik adalah ilmu yang mengkaji hubungan kekuasaan, baik sesama warga negara, antar warga negara dan negara dan hubungan sesama warga, maka bidang kajian dalam Ilmu Politik meliputi: teori ilmu politik yang mencakup teori politik serta perkembangan ide-ide politik; lembaga-lembaga politik yang melingkupi UUD, pemerintahan nasional, Pemerintah Daerah (Pemda), dan lokal; partai politik meliputi organisasi kemasyarakatan, pendapat umum, serta membahas mengenai keterlibatan warga negara dalam pemerintahan dan administrasi; dan terakhir membahas mengenai hubungan internasional.⁴⁹ Pemerintahan nasional dan daerah, dalam Ilmu politik, kita akan mengenal sistem politik, struktur, fungsi, pendekatan, dan kapabilitas politik. Politik tidak dapat terlepas dari adanya kepentingan. Kelompok kepentingan (*interest group*) adalah setiap organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah, tanpa berkehendak memperoleh jabatan di pemerintahan, misalnya adalah Organisasi Masyarakat (ORMAS) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).⁵⁰ Namun tidak dengan partai politik, yang pada awalnya lahir di wilayah Eropa Barat, setelah meluasnya anggapan bahwa rakyat merupakan faktor penting yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik. Partai politik dianggap sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah.⁵¹ Menurut Miriam Budiarto, partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan tujuan yang sama. Tujuan dari kelompok ini adalah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik melalui cara yang konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan yang mereka miliki.⁵² Tujuan Partai Politik adalah sebagai wadah aktualisasi, agregasi, sarana, serta sebagai tempat berkumpul bagi kelompok yang memiliki kepentingan bersama.

⁴⁹Rahman, *Sistem Politik Indonesia*, hlm. 7-8.

⁵⁰Rahman, *Sistem Politik Indonesia*, hlm. 85.

⁵¹Rahman, *Sistem Politik Indonesia*, hlm. 101.

⁵²Rahman, *Sistem Politik Indonesia*, hlm. 102.

Dengan adanya partai politik, maka bisa dikatakan bahwa budaya politik masyarakat Indonesia cukup baik, hal ini dilihat dari kegiatan partai-partai politik, gejolak antara masyarakat dan pemerintah hingga pengaruh politik ke lingkungan sosial masyarakat. Menurut Taufik Abdullah, ilmu sejarah adalah usaha para akademisi dan kritis untuk merekonstruksi masa lalu yang dimulai dengan berbagai pertanyaan.⁵³ Maka penulisan skripsi ini dimulai dengan pertanyaan tentang bagaimana perjuangan seorang Megawati Soekarnoputri dalam memperjuangkan haknya dan masyarakat untuk terlepas dari cengkraman rezim Orba.

Desoekarnoisasi adalah salah satu langkah awal yang diambil oleh pemerintah Orba dalam melanggengkan kekuasaannya, makna desoekarnoisasi adalah usaha untuk memutus usaha mata rantai Soekarno dalam kehidupan birokrasi, militer, dan masyarakat. Segala sesuatu yang berbau Soekarno selalu dicurigai, ditekan, dan kalau perlu diberangus.⁵⁴ Besarnya intimidasi yang dilakukan oleh pemerintah Orba, membuat banyak pengagum Soekarno dan orang-orang terdekat Soekarno yang memilih untuk bersembunyi. Pemerintah juga melakukan depolitisasi dalam kehidupan masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), depolitisasi adalah penghilangan kegiatan politik, salah satu contohnya adalah meneror masyarakat akan bahaya komunisme dan PKI serta melakukan fusi kepada partai-partai yang ada, sehingga membatasi ruang gerak bagi politik di Indonesia. Selama berkuasa di Indonesia, pemerintah Orba menjadi pemerintahan yang bersifat represif dan otoriter. Gaya pemerintah yang menindas dan sewenang-wenang, melahirkan rasa takut yang dialami oleh masyarakat. Setelah melakukan depolitisasi, pemerintah Orba melakukan gerakan politisasi pada seluruh aspek bermasyarakat. Makna politisasi adalah hal membuat segala aspek kehidupan bersifat politis, akibatnya masyarakat mudah diprovokasi dan terprovokasi dengan masalah-masalah yang ada.

⁵³Abdullah, Taufik., “Perdebatan Sejarah dan Tragedi 1965” Sejarah 9, hlm. 2.

⁵⁴Sudiby, Agus., “Desoekarnoisasi: Delegitimasi yang Tidak Tuntas”, *Kompas*, 1 Juni 2001.

Megawati Soekarnoputri menjadi sebuah figur baru bagi emansipasi perempuan, pemerintah Orba cenderung mengecilkan peran perempuan dengan politik jendernya yang memberikan pembatasan hak dalam hal sosial dan politik. Kemunculan Megawati Soekarnoputri menunjukkan bahwa perempuan bisa berpolitik, terlepas dari kodratnya sebagai perempuan yang secara biologis digambarkan dengan organ reproduksinya dan dalam hal gender memiliki peran besar dalam keluarga.⁵⁵ Pengertian Gender sendiri berasal dari bahasa Inggris Gender yang bermakna jenis kelamin, yang merupakan sebuah konsep kultural untuk membuat perbedaan dalam hal peran, berperilaku, mentalitas, dan karakter emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di masyarakat.⁵⁶ Ia perempuan pertama Indonesia yang berhasil mendapatkan jabatan menjadi Wakil Presiden, dan kemudian Presiden serta pemimpin partai politik besar, dan tidak mudah bagi Megawati Soekarnoputri untuk mendapatkan semuanya itu.

Sebagai usaha melanggengkan pemerintahannya, pemerintah Orba melakukan penataan pada penciptaan stabilitas politik yang mampu menopang membuat pembangunan.⁵⁷ Pengontrolan ini ternyata menimbulkan tiga kelompok politik, yakni kelompok kepentingan, kelompok penekan, dan partai politik. Kelompok kepentingan adalah sekelompok orang yang bersekutu karena memiliki kepentingan-kepentingan tertentu, berorganisasi yang mempengaruhi keputusan politik. Sedangkan kelompok penekan adalah sekelompok manusia yang berbentuk lembaga kemasyarakatan dengan aktivitas atau kegiatannya memberikan tekanan kepada pihak penguasa untuk

⁵⁵Eman Hermawan, *Politik Isu Tunggal: Jalan Buntu Gerakan Masyarakat Sipil* (Jogjakarta: Yayasan Kajian dan Layanan Informasi untuk Kedaulatan Rakyat, 2002), hlm.110.

⁵⁶Hemawan, *Politik Isu Tunggal*, hlm. 86.

⁵⁷Nazarudin Sjamsudin, "Politik di Indonesia", dalam Rodee, Carlton, *et al.*, *Pengantar Ilmu Politik*, terjemahan Zulkifly Hamid (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2002), hlm. 487.

memaksakan kehendakannya kepada penguasa.⁵⁸ Definisi partai Politik menurut Profesor Meriam Budiardjo adalah suatu kelompok yang terorganisir di mana para anggotanya mempunyai orientasi, cita-cita dan nilai-nilai yang sama. Tujuan kelompok ini yaitu memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakannya.⁵⁹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode sejarah yang memiliki arti proses menguji dan menganalisis secara kritis pada rekaman dan peninggalan masa lampau.⁶⁰ Metode penelitian sejarah mencakup empat kegiatan yaitu heuristik atau pengumpulan sumber, kritik atau pengujian sumber, interpretasi atau penafsiran sumber, dan historiografi atau penulisan sejarah yang akan disaring lagi agar menjadikan hasil penelitian sejarah yang baik dan relevan. Tahap heuristik dalam metode penulisan sejarah adalah satu teknik yang dilakukan untuk memperoleh jejak-jejak atau peninggalan masa lalu.⁶¹ Pembahasan mengenai perjalanan politik Megawati Soekarnoputri dari era Orba hingga era awal reformasi diharapkan bisa tercapai. Di dalam tahap ini, penulis mengumpulkan sumber-sumber yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Pertama, penulis mengumpulkan sumber-sumber tertulis terlebih dahulu dari 1965 sampai 1970, kemudian dilanjutkan 1987 sampai tahun 1998, tahun setelah kejatuhan Soekarno sampai saat Megawati dilantik menjadi Presiden ke-5 RI sekaligus

⁵⁸Johan Jasin, *Hukum Tata Negara Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2016), hlm. 84-88.

⁵⁹Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1977), hlm. 160-163.

⁶⁰Louis Gottschalk., *Mengerti Sejarah: Pengantar Metode Sejarah*, Nugroho Notosusanto, *terj.*, (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1975), hlm. 32.

⁶¹G. J. Renier, *Metode dan Manfaat Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 113.

sebagai Presiden Indonesia pertama yang berjenis kelamin perempuan. Penulis juga mengumpulkan buku-buku yang berhubungan dengan Megawati, Orba, serta biografi Soekarno yang berisikan ideologi politik dan kebangsaan yang kemudian diturunkan kepada Megawati. Dalam mengumpulkan sumber tertulis, penulis menggunakan data yang diambil dari koran-koran yang terdapat di perpustakaan UPT Universitas Diponegoro, Depo Arsip Suara Merdeka, dan koleksi pribadi. Penulis mendapatkan surat-surat resmi dan Undang-Undang yang dikeluarkan oleh pemerintah di Kantor Sekretaris Negara. Kendala yang dihadapi oleh penulis adalah surat-surat resmi serta Undang-Undang yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak ada di kantor Arsip Nasional Republik Indonesia, karena ANRI hanya memegang data hingga tahun 1950-an. Kendala lainnya adalah perpustakaan-perpustakaan yang dikunjungi oleh penulis, tidak memiliki koleksi yang lengkap.

Penulis juga mengumpulkan sumber-sumber lisan yang didapatkan melalui metode sejarah lisan. Menurut Paul Thompson, sejarah lisan tidak hanya merubah isi tulisan melainkan juga proses penulisan sejarah walaupun banyak orang yang meragukan data yang dikumpulkan.⁶² Dalam mengumpulkan data sumber-sumber lisan, penulis melakukan wawancara dengan Prof. Dr. A.M. Djuliaty Soerojo, sehingga penulis bisa mendapatkan gambaran mengenai keadaan pasca peristiwa G30S. Penulis berhasil melakukan wawancara dengan kader PDI Perjuangan pusat, H. Muhammad Sadji, BcM, SE, Msi., yang memberikan pandangan kepada penulis mengenai pandangan pengagum sosok Megawati Soekarnoputri. Penulis juga melakukan wawancara kepada Bapak Boediman yang memberikan pandangan kontra terhadap sosok Megawati. Penulis tidak bisa melakukan wawancara langsung dengan tokoh yang dibahas, yaitu Megawati sehingga relevan untuk dijadikan narasumber atau referensi. Kendala yang dihadapi oleh penulis adalah karena kesibukan yang dimiliki oleh Megawati.

⁶²Bambang Purwanto, *Gagalnya Historiografi Indonesiasentris?!* (Jogjakarta: Penerbit Ombak, 2006), hlm. 45.

Setelah tahap heuristik dirasa mencukupi, selanjutnya adalah tahap kritik sumber. Kritik sumber dilakukan untuk mengkritisi sumber-sumber sejarah baik lisan maupun tulisan. Hal ini dilakukan agar penulis bisa mendapatkan keaslian sumber sehingga penelitian sejarah akan relevan. Ada dua cara dalam menilai sumber-sumber sejarah, yaitu kritik ekstern dan intern.

Kritik ekstern dilakukan untuk mendapatkan keaslian sumber, sedangkan kritik intern dilakukan untuk membandingkan sumber yang satu dengan sumber yang lain untuk mendapatkan data yang akurat dan tepat. Karena jika belum tepat, maka sumber-sumber tersebut tidak bisa dijadikan acuan dalam penelitian ini. Tahap ketiga adalah interpretasi sejarah, kegiatan interpretasi adalah membandingkan fakta-fakta yang sudah dikumpulkan, sehingga bisa dijadikan sebagai acuan penelitian. Dalam interpretasi, dibutuhkan imajinasi penulis sehingga penulis bisa mendapatkan gambaran yang bulat dan bisa menuliskan penelitiannya.

Pada tahap ini, penulis menyusun hasil penelitian sumber yang sudah didapatkan, sehingga bisa dinikmati dan dimanfaatkan oleh yang membaca. Meminjam istilah Alan Muslow, yang paling penting adalah adanya kesadaran destruktif untuk merekonstruksi masa lalu yang tetap didasarkan pada fakta.⁶³

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan mengenai Megawati ini terdiri dari lima bab yang akan dibahas, yaitu :

Bab I Pendahuluan, terdiri dari beberapa hal pokok mengenai latar belakang dan permasalahannya, ruang lingkup, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika.

Bab II Indonesia pada Masa Orba, Pada bab kedua, terdiri dari: Konsolidasi politik Orba, penyederhanaan partai politik, pengendalian aktifitas politik masyarakat.

⁶³Purwanto, *Gagalnya Historiografi Indonesiasentris?!*, hlm. 76.

Bab III Megawati dalam Tekanan Orba, mencakup: konflik internal PDI, pengebirian politik Megawati, dan legalitas politik Megawati.

Bab IV Megawati dalam Panggung Kekuasaan Politik Nasional Indonesia, yang terdiri dari: Megawati Soekarnoputri dalam pusaran reformasi, Megawati saat menjabat sebagai wakil presiden, dan Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden RI.

Bab V Simpulan yang berisi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian, yang sudah dikaji dalam bab-bab terdahulu dalam skripsi ini.